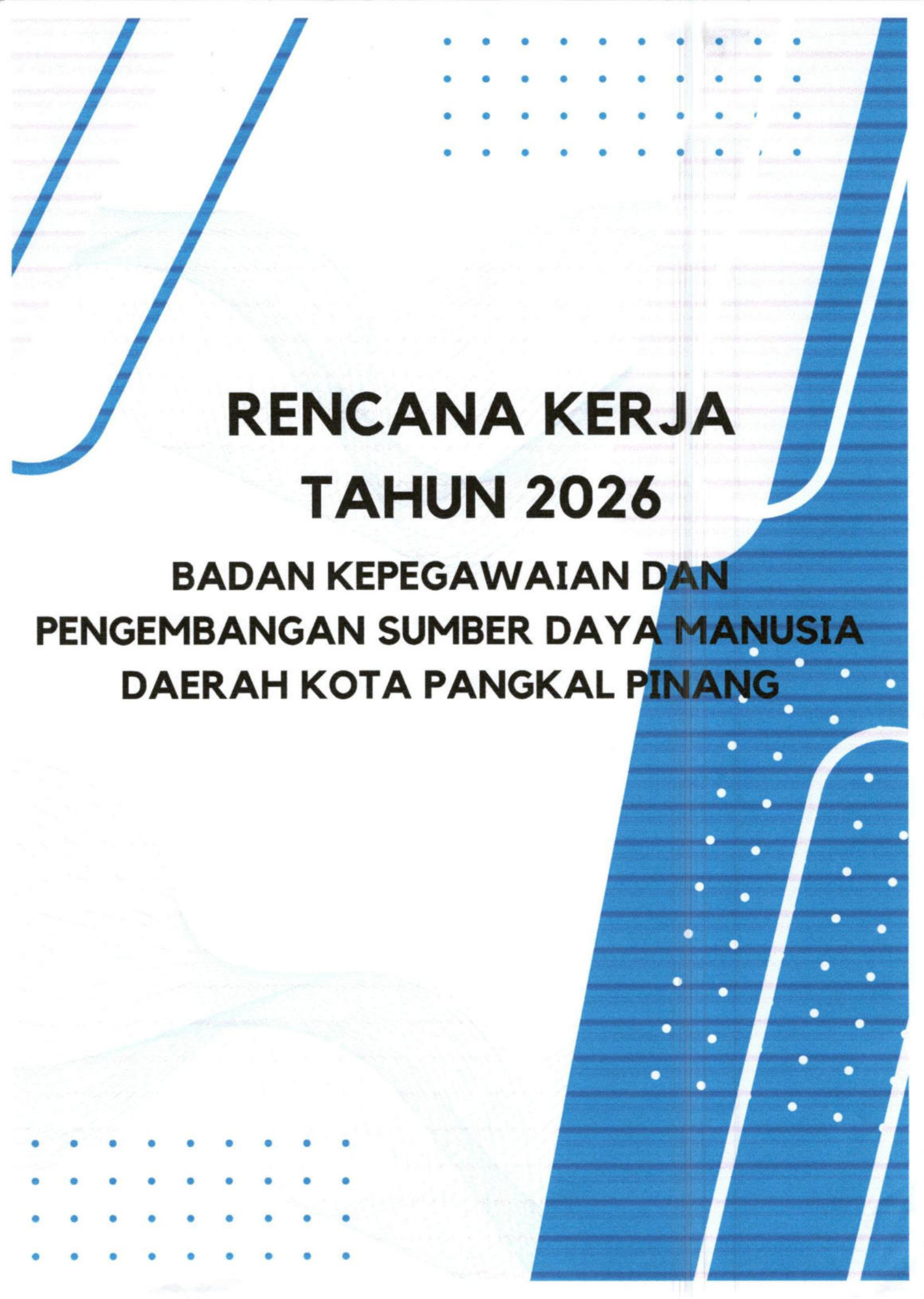




RENCANA KERJA TAHUN 2026

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KOTA PANGKAL PINANG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Renja Tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang dapat diselesaikan.

Mendasari ketentuan pada Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026, Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholder* terhadap pembangunan Kota Pangkal Pinang. Renja Tahun 2026 disusun dengan mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

Atas tersusunnya Renja Tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang ini kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukanya.

Pangkal Pinang, 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kota Pangkal Pinang



FAHRIZAL, S.T., M.M
Pembina Tk I /IVb
NIP. 198502062008041001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kota Pangkal Pinang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kota Pangkal Pinang yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkal Pinang yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tahun 2026 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan tujuan dan sasaran daerah serta tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan atau Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kota Pangkal Pinang sehingga dapat menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2026, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
13. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);
14. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 252).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2026, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang, sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.

1.3 Sistematika RENJA

Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran. Sistematika Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

BAB I Pendahuluan

BAB II Hasil evaluasi Renja Tahun 2024

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) serta memuat permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2024 melaksanakan 3 (Tiga) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.618.399.552,- (Enam Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima puluh Dua Rupiah). Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

A. Realisasi Program / Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja 3 dokumen dengan capaian kinerja 3 dokumen (100%).
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target kinerja 1 dokumen dengan capaian kinerja 1 dokumen (100%).
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target kinerja 1 dokumen dengan capaian kinerja 1 dokumen (100%).
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan target kinerja 1 dokumen dengan capaian kinerja 1 dokumen (100%).
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan target kinerja 1 dokumen dengan capaian kinerja 1 dokumen (100%).
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja 2 laporan dengan capaian kinerja 2 laporan (100%).
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 3 laporan dengan capaian kinerja 3 laporan (100%).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan dengan target kinerja 30 orang dengan capain kinerja 29 orang (97%).
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target kinerja 1 laporan dengan capain kinerja 1 laporan (100%).
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan target kinerja 1 laporan dengan capain kinerja 1 laporan (100%).

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 8) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan target kinerja 1 dokumen dengan capaian kinerja 1 dokumen (100%).

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan target kinerja 6 orang dengan capaian kinerja 6 orang (100%).

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja 1 paket dengan capain kinerja 1 paket (100%).
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan target kinerja 2 paket dengan capain kinerja 1 paket (50%).
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target kinerja 2 paket dengan capain kinerja 2 paket (100%).
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dengan target kinerja 1 paket dengan capain kinerja 1 paket (100%).
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan dengan target kinerja 1 laporan dengan capain kinerja 1 laporan (100%).

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan target kinerja 1 laporan dengan capain kinerja 1 laporan (100%).
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 1 laporan dengan capain kinerja 1 laporan (100%).
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja 1 laporan dengan capain kinerja 1 laporan (100%).

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan target kinerja 1 unit dengan capain kinerja 1 unit (100%).
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target kinerja 4 unit dengan capain kinerja 4 unit (100%).
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target kinerja 1 unit dengan capain kinerja 1 unit (100%).

2) Program Kepegawaian Daerah :

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- 1) Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN dengan target kinerja 1 dokumen dengan capain kinerja 1 dokumen (100%).
- 2) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan target kinerja 1 dokumen dengan capain kinerja 1 dokumen (100%).
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan target kinerja 1 dokumen dengan capain kinerja 1 dokumen (100%).
- 4) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dengan target kinerja 1 lembaga dengan capain kinerja 1 lembaga (100%).
- 5) Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN dengan target kinerja 1 dokumen dengan capain kinerja 1 dokumen (100%).
- 6) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan target kinerja 1 dokumen dengan capain kinerja 1 dokumen (100%).
- 7) Pengelolaan Data Kepegawaian dengan target kinerja 1 dokumen dengan capain kinerja 1 dokumen (100%).

b. Mutasi dan Promosi ASN

- 1) Pengelolaan Mutasi ASN dengan target kinerja 1 dokumen dengan capain kinerja 1 dokumen (100%).
- 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan target kinerja 1 dokumen dengan capain kinerja 1 dokumen (100%).

- 3) Pengelolaan Promosi ASN dengan target kinerja 1 dokumen dengan capain kinerja 1 dokumen (100%).
- c. Pengembangan Kompetensi ASN
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dengan target kinerja 50 orang dengan capain kinerja 50orang (100%).
 - 2) Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN dengan target kinerja 1 dokumen dengan capain kinerja 1 dokumen (100%).
 - 3) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan target kinerja 7 orang dengan capain kinerja 7 orang (100%).
 - 4) Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN dengan target kinerja 1 Laporan dengan capain kinerja 1 Laporan (100%).
 - 5) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional dengan target kinerja 50 orang dengan capain kinerja 50 orang (100%).
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target kinerja 1 dokumen dengan capain kinerja 1 dokumen (100%).
 - 2) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Pegawai dengan target kinerja 70 orang dengan capain kinerja 70 orang (100%).
 - 3) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan target kinerja 1 Laporan dengan capain kinerja 1 Laporan (100%).

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Pengembangan Kompetensi Teknis

- 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 70 orang dengan capain kinerja 600 orang (100%).

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan target kinerja 1 laporan dengan capain kinerja 1 laporan (100%).

Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi hasil Pelaksanaan Renja (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

TRIWULAN IV
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Pangkalpinang Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	050301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	85	4.248.287.264	84,530	663.144.600	88,430	1.390.412.476	88,770	865.046.063	89,180	1.061.411.800	89,180	3.980.014.939	100	93,685	Sekretariat
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	77,500		77,450		77,450		77,450		77,450		77,450		99,935		Sekretariat
2		050301201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	12.251.000	25	0	50	3.571.800	75	906.300	100	7.003.700	100	11.481.800	100	93,721	Kasubbag PEP dan Keuangan
3		050301201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	1.427.100	0	0	3	1.362.100	3	0	3	0	3	1.362.100	100	95,445	Kasubbag PEP dan Keuangan
4		050301201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	2.760.700	0	0	0	0	0	0	1	2.495.500	1	2.495.500	100	90,394	Kasubbag PEP dan Keuangan
5		050301201003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1.540.300	0	0	0	0	0	0	1	1.493.800	1	1.493.800	100	96,981	Kasubbag PEP dan Keuangan
6		050301201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1.548.400	0	0	0	0	0	0	1	1.509.600	1	1.509.600	100	97,494	Kasubbag PEP dan Keuangan
7		050301201005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1.511.500	0	0	0	0	0	0	1	1.504.800	1	1.504.800	100	99,557	Kasubbag PEP dan Keuangan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						I		II		III		IV							
						1	2	3	4	5	6	7	8					9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8		050301201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	1.613.200	0	0	2	1.559.700	2	0	2	0	2	1.559.700	100	96,684	Kasubbag PEP dan Keuangan
9		050301201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	1.849.800	0	0	3	650.000	3	906.300	3	0	3	1.556.300	100	84,133	Kasubbag PEP dan Keuangan
10		050301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	3.584.906.064	25	585.782.722	50	1.213.854.606	75	735.376.265	100	848.069.705	100	3.383.083.298	100	94,370	Kasubbag PEP dan Keuangan
11		050301202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	34	3.581.260.464	28	585.782.722	29	1.212.992.606	29	733.042.365	29	848.069.705	29	3.379.887.398	85,294	94,377	Kasubbag PEP dan Keuangan
12		050301202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1.661.000	0	0	1	862.000	1	607.100	1	0	1	1.469.100	100	88,447	Kasubbag PEP dan Keuangan
13		050301202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1.984.600	0	0	0	0	1	1.726.800	1	0	1	1.726.800	100	87,010	Kasubbag PEP dan Keuangan
14		050301203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang ditata dan diinventarisir (Dengan Satuan:%)	100	1.570.100	25	0	50	0	75	1.410.800	100	0	100	1.410.800	100	89,854	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
15		050301203001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1.570.100	0	0	0	0	0	1.410.800	1	0	1	1.410.800	100	89,854	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
16		050301205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	0	17.400.000	0	11.600.000	0	5.800.000	0	0	0	0	0	17.400.000	0	100	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
17		050301205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	6	17.400.000	4	11.600.000	6	5.800.000	6	0	6	0	6	17.400.000	100	100	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
18		050301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	232.540.800	25	18.808.550	50	75.464.566	75	35.678.465	100	81.632.510	100	211.584.091	100	90,988	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
19		050301206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	7.498.000	0	0	1	1.554.000	1	2.056.000	1	2.258.000	1	5.868.000	100	78,261	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							6		7		8		9						
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13
20		050301206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan Paket)	2	1.734.100	0	0	1	250.000	1	250.000	1	500.000	1	1.000.000	50	57.667	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
21		050301206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	11.879.200	0	0	2	5.515.000	2	4.324.000	2	0	2	9.839.000	100	82.875	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
22		050301206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	11.429.500	0	0	1	2.910.000	1	3.365.000	1	3.250.000	1	9.525.000	100	83.337	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
23		050301206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	200.000.000	0	18.808.550	0	65.235.566	0	25.683.465	1	75.624.510	1	185.352.091	100	92.676	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
24		050301208	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	281.864.376	25	34.733.848	50	71.268.580	75	65.151.759	100	82.039.848	100	253.194.035	100	89.828	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
25		050301208002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	87.281.000	0	10.862.152	0	14.975.036	0	25.598.735	1	18.250.236	1	69.686.159	100	79.841	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
26		050301208003	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.591.000	0	0	0	8.286.000	0	0	1	12.080.000	1	20.366.000	100	79.583	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
27		050301208004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	168.992.376	0	23.871.696	0	48.007.544	0	39.553.024	1	51.709.612	1	163.141.876	100	96.538	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
28		050301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	117.754.924	25	12.219.480	50	20.452.924	75	26.522.474	100	42.666.037	100	101.860.915	100	86.502	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
29		050301209001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	26.542.228	1	2.000.000	1	2.300.000	1	7.674.500	1	6.535.000	1	18.509.500	100	69.736	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
30		050301209002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	4	68.941.000	4	6.840.864	4	11.085.000	4	13.780.050	4	29.373.805	4	61.079.719	100	88.597	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
31		050301209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	22.271.696	1	3.378.616	1	7.067.924	1	5.067.924	1	6.757.232	1	22.271.696	100	100	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		99,968	93,685	
PREDIKAT KINERJA																		ST	ST	
32	-	050302	PROGRAM KEPEGAWAIA N DAERAH	Rasio pegawai fungsional (Dengan Satuan:%)	26	1.251.336.588	27	57.607.544	29	327.216.635	26	257.627.212	26	457.363.528	26	1.099.814.919	100	87,891	Perencanaan , Pengadaan , Mutasi dan Data	
				Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:%)	47		39		39		39		49		49		100		Perencanaan , Pengadaan , Mutasi dan Data	
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Dengan Satuan:%)	100		83		83,050		83,230		84		84		84		Perencanaan , Pengadaan , Mutasi dan Data	
				Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN (Dengan Satuan:%)	7		0		0		5,100		8,100		8,100		100		Perencanaan , Pengadaan , Mutasi dan Data	
				Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan (Dengan Satuan:%)	92		0		0		100		100		100		100		Perencanaan , Pengadaan , Mutasi dan Data	
				Persentase jumlah event yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100		0		0		0		100		100		100		Perencanaan , Pengadaan , Mutasi dan Data	
33		050302201	Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN (Dengan Satuan:%)	100	738.866.584	27	39.047.544	55	235.882.634	78	117.428.035	100	260.502.883	100	652.861.096	100	88,360	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan	
34		050302201001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	162.497.300	0	0	0	0	0	5.447.745	1	109.681.190	1	115.128.935	100	70,850	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	
35		050302201002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	23.070.000	0	1.640.000	0	12.339.230	0	2.068.000	1	6.623.966	1	22.691.196	100	98,358	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	
36		050302201003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dengan Satuan:Dokumen)	1	19.938.600	0	0	0	16.392.175	0	855.500	1	0	1	17.247.675	100	86,504	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	
37		050302201006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	18.107.400	0	0	0	10.467.116	0	5.029.920	1	0	1	15.497.036	100	85,584	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab			
						I		II		III		IV							
						1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13
38		050302201008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Lembaga)	1	163.764.900	0	0	0	96.239.500	0	13.954.340	1	42.008.320	1	152.202.160	100	92,939	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
39		050302201009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	277.437.264	0	37.407.544	0	76.387.713	0	53.867.530	1	90.854.002	1	258.516.789	100	93,180	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
40		050302201010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	32.403.200	0	0	0	606.000	0	26.950.000	1	4.007.000	1	31.563.000	100	97,407	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
41		050302201011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	41.647.920	0	0	0	23.450.900	0	9.235.000	1	7.328.405	1	40.014.305	100	96,078	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
42		050302202	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN (Dengan Satuan:%)	100	219.311.300	25	0	43	59.893.485	55	53.242.965	100	80.636.340	100	193.772.790	100	88,355	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
43		050302202001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	87.122.800	0	0	0	5.293.140	0	33.820.450	1	46.976.025	1	86.089.615	100	98,814	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
44		050302202002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	91.728.000	0	0	0	49.842.305	0	7.627.300	1	28.018.600	1	85.488.205	100	93,198	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
45		050302202003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	40.460.500	0	0	0	4.758.040	0	11.795.215	1	5.641.715	1	22.194.970	100	54,856	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
46		050302203	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Dengan Satuan:%)	100	230.953.904	19	16.510.000	28	17.145.316	62	73.162.462	100	89.814.855	100	196.632.633	100	85,139	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
47		050302203001	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	50	26.073.704	1	0	11	0	46	13.999.762	50	9.699.405	50	23.699.167	100	90,893	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
48		050302203003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	32.150.100	0	0	0	0	0	1.507.200	1	26.640.590	1	28.147.790	100	87,551	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
49		050302203004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Dengan Satuan:Orang)	7	99.606.400	3	14.460.000	3	8.492.006	5	37.836.500	7	23.404.565	7	84.193.071	100	84,526	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
50		050302203007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (Dengan Satuan:Laporan)	1	36.861.600	0	0	0	0	0	15.869.000	1	11.032.940	1	26.701.940	100	72,834	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
51		050302203014	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Dengan Satuan:Orang)	50	36.462.100	15	2.050.000	24	8.653.310	49	4.150.000	50	19.037.355	50	33.890.665	100	92,948	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
52		050302204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun (Dengan Satuan:%)	100	62.204.800	19	2.050.000	50	14.295.200	74	13.793.750	100	26.409.450	100	56.548.400	100	90,907	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
53		050302204002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Dokumen)	1	21.149.800	0	0	0	724.000	0	0	1	19.901.115	1	20.625.115	100	97,519	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
54		050302204004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Dengan Satuan:Orang)	70	16.568.500	0	0	0	820.000	70	13.793.750	70	1.640.000	70	16.253.750	100	98,100	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
55		050302204006	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:Laporan)	1	24.486.500	0	2.050.000	0	12.751.200	0	0	1	4.868.335	1	19.669.535	100	80,328	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	97,333	87,891	
PREDIKAT KINERJA																	ST	T	
56	-	050402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Dengan Satuan:%)	30	1.118.775.700	25,740	77.560.000	25,740	104.616.872	25,740	340.617.185	33,120	497.826.331	33,120	1.020.620.388	100	91,227	Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
				Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Dengan Satuan:%)	33		26,290		26,290		26,290		30,030		30,030		91		Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
57		050402201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Dengan Satuan:%)	100	82.091.500	15	0	25	1.640.000	35	7.976.260	100	67.601.830	100	77.218.090	100	94,063	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
58		050402201003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Orang)	70	82.091.500	0	0	0	1.640.000	0	7.976.260	600	67.601.830	600	77.218.090	100	94,063	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
59		050402202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (Dengan Satuan:%)	100	1.036.684.200	30	77.560.000	63	102.976.872	77	332.640.925	100	430.224.501	100	943.402.298	100	91,002	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						I		II		III		IV							
						1	2	3	4	5	6	7	8					9	10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
60		050402202007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dengan Satuan Laporan)	1	1.036.684.200	0	77.560.000	0	102.976.872	0	332.640.925	1	430.224.501	1	943.402.298	100	91.002	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																95,500	91,227		
PREDIKAT KINERJA																ST	ST		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																97,494	90,934		
PREDIKAT KINERJA																ST	ST		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Pelaksanaan sub kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan pelaksanaan pencairan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Sub kegiatan yang dilaksanakan di triwulan ke IV tidak sesuai dengan prediksi di anggaran perubahan dan dicairkan sesuai kebutuhan - Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan): Karena ada perubahan peraturan rumusan perhitungan indikator - persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural: pembentukan OPD baru dengan jabatan yang baru dan adanya perubahan pejabat melalui promosi ataupun demosi yang mempengaruhi jumlah pejabat															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:				- Melaksanakan proses penilaian anggaran sub kegiatan sesuai dengan diadwalkan															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:				- Melaksanakan proses pencairan anggaran sub kegiatan sesuai dengan dijadwalkan															

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SUMBER DANA APBD KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2024**

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KOTA
PANGKALPINANG

BULAN : DESEMBER 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN	VOL	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI		SUMBER DANA	KET	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN	FISIK (%)			
							RP	(%)			
KEPEGAWAIAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3	DOKUMEN	1.427.100	1.427.100	1.362.100	95,45	100	APBDP Kota PKP
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			31.000	31.000	29.000			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			64.000	64.000	56.500			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			282.100	318.100	277.600			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			132.000	132.000	117.000			
			Belanja Lembur			918.000	882.000	882.000			
		2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1	DOKUMEN	1.390.700	2.760.700	2.495.500	90,39	100	APBDP Kota PKP
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			317.700	317.700	123.000			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			271.000	271.000	251.500			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			400.000	400.000	400.000			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			402.000	402.000	351.000			
			Belanja Lembur				1.370.000	1.370.000			

		3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1	DOKUMEN	1.340.300	1.540.300	1.493.800	96,98	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			39.700	39.700	32.700				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			133.000	133.000	121.500				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			69.600	97.600	69.600				
			Belanja Lembur			1.098.000	1.270.000	1.270.000				
		4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1	DOKUMEN	1.348.400	1.548.400	1.509.600	97,49	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			59.800	72.000	42.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			69.000	69.000	65.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			107.600	112.400	107.600				
			Belanja Lembur			1.112.000	1.295.000	1.295.000				
		5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1	DOKUMEN	1.311.500	1.511.500	1.504.800	99,56	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			21.100	32.500	29.800				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			69.000	69.000	65.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			36.400	40.000	40.000				
			Belanja Lembur			1.185.000	1.370.000	1.370.000				

		6	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2	LAPORAN	1.613.200	1.613.200	1.559.700	96,68	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			70.500	70.500	68.500				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			266.000	266.000	243.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			255.700	261.700	251.200				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			135.000	135.000	117.000				
			Belanja Lembur			886.000	880.000	880.000				
		7	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3	LAPORAN	1.849.800	1.849.800	1.556.300	84,13	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			299.500	299.500	82.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			133.000	133.000	121.500				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			239.300	239.300	234.800				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			528.000	528.000	468.000				
			Belanja Lembur			650.000	650.000	650.000				
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	30	ORANG/BULAN	6.532.916.556	3.581.261.822	3.379.887.398	94,38	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja gaji pokok PNS			1.485.651.431	1.485.651.431	1.424.088.600				
			Belanja gaji pokok PPPK			29.533.210	29.533.210	28.832.400				
			Belanja tunjangan keluarga PNS			159.261.897	159.261.897	149.493.768				
			Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			39.714.228	6.599.310	4.036.536				
			Belanja tunjangan jabatan PNS			132.515.331	132.515.331	126.350.000				
			Belanja tunjangan fungsional PNS			92.969.305	92.969.305	61.320.000				
			Belanja tunjangan fungsional PPPK			8.763.750	8.763.750	7.810.000				

			Belanja tunjangan fungsional umum PNS			30.482.834	30.482.834	17.680.000				
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			14.820.000						
			Belanja tunjangan beras PNS			92.079.595	92.079.595	87.193.680				
			Belanja Tunjangan Beras PPPK			25.929.173	5.929.173	2.607.120				
			Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS			3.289.318	3.289.318	3.091.440				
			Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK			922.500	922.500					
			Belanja pembulatan gaji PNS			31.127	32.485	20.270				
			Belanja Pembulatan Gaji PPPK			28.195	28.195	256				
			Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS			1.417.744.894	1.351.623.720	1.296.420.000				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			2.917.200.000	99.600.000	99.600.000				
			Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan			48.820.000	48.820.000	45.736.000				
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			29.305.596	29.305.596	22.131.200				
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			1.712.988	1.712.988	1.544.871				
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			2.141.184	2.141.184	1.931.257				
		2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1	LAPORAN	1.661.000	1.661.000	1.469.100	88,45	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			136.900	136.900	49.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			133.000	133.000	121.500				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			368.100	394.100	319.600				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			135.000	135.000	117.000				
			Belanja Lembur			888.000	862.000	862.000				

		3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	1	LAPORAN	1.984.600	1.984.600	1.726.800	87,01	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			272.300	272.300	109.000				
						404.000	404.000	373.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			661.300	661.300	612.800				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			132.000	132.000	117.000				
			Belanja Lembur			515.000	515.000	515.000				
3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1	DOKUMEN	1.570.100	1.570.100	1.410.800	89,85	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			268.300	268.300	181.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			335.000	335.000	308.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			570.800	570.800	570.800				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			396.000	396.000	351.000				
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1	PAKET	7.498.000	7.498.000	5.868.000	78,26	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			7.498.000	7.498.000	5.868.000				
		2.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2	PAKET	1.734.100	1.734.100	1.000.000	57,67	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran			734.100	700.000	0				tidak bisa dicairkan karena dana tidak mencukupi
			Belanja Bahan-Isi Tabung Gas			1.000.000	1.000.000	1.000.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				34.100					

		3.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2	PAKET	11.879.200	11.879.200	9.839.000	82,83	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			4.128.200	4.128.200	2.615.500				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			2.696.000	2.696.000	2.501.500				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			2.790.000	2.790.000	2.457.000				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.265.000	2.265.000	2.265.000				
		4.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1	PAKET	11.429.500	11.429.500	9.525.000	83,34	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			11.429.500	11.429.500	9.525.000				
		5.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1	LAPORAN	150.000.000	200.000.000	185.352.091	92,68	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			150.000.000	200.000.000	185.352.091				
5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1	LAPORAN	87.281.000	87.281.000	69.686.159	79,84	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Tagihan Telepon			1.000.000	1.000.000	989.024				
			Belanja Tagihan Listrik			86.281.000	86.281.000	68.697.135				
		2.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1	LAPORAN	25.591.000	25.591.000	20.366.000	79,58	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya			15.991.000	15.991.000	11.541.000				
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			3.000.000	3.000.000	3.000.000				
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			3.000.000	3.000.000	2.875.000				
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya			1.200.000	1.200.000	1.200.000				
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			2.400.000	2.400.000	1.750.000				

		3.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1	LAPORAN	162.992.376	168.992.376	163.141.876	96,54	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			7.290.000	7.290.000	4.000.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			9.472.200	9.472.200	6.961.700				
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi			124.358.480	129.358.480	129.358.480				
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			21.271.696	22.271.696	22.271.696				
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah			600.000	600.000	550.000				
6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1	UNIT	40.241.000	26.542.228	18.509.500	69,74	100	APBDP Kota PKP	Karena adanya pengunduran diri supir eselon II sehingga Anggaran Belanja Jasa Tenaga Supir tidak bisa dicairkan
			Belanja Jasa Tenaga Supir			21.931.696	5.232.924					
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			1.315.000	1.315.000	1.014.500				
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			16.994.304	19.994.304	17.495.000				
		2.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	4	UNIT	59.341.000	68.941.000	61.079.719	88,60	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			7.200.000	7.200.000	3.379.800				
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			52.141.000	61.741.000	57.699.919				
		3.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1	UNIT	21.271.696	22.271.696	22.271.696	100,00	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan			21.271.696	22.271.696	22.271.696				

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

1	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	1.	PERUMUSAN BAHAN KEBUJUKAN PENGADAAN ASN	1	DOKUMEN	147.497.300	162.497.300	115.128.935	70,85	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Bahan-Bahan Kimia			2.513.200	497.300	350.000				
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya			1.070.000	535.000	535.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			457.000	10.272.000	4.700.900				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			138.000	1.970.000	1.970.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			18.601.600	16.418.800	3.600.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			396.000	2.129.200	2.112.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			2.430.000	3.000.000	2.640.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			1.839.000	1.839.000					
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			577.500	1.386.000	947.100				
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			24.000.000	42.000.000	29.400.000				
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			2.000.000	2.000.000					Karena pada saat acara tidak dihadiri pejabat sehingga honorarium narasumber tidak bisa dicairkan
			Honorarium Penyelenggara Ujian			35.400.000	4.400.000					Karena sudah dibayarkan oleh pihak penyelenggara CAT
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			5.000.000	10.000.000	5.000.000				
			Belanja Paket/Pengiriman			500.000	1.000.000	460.000				
			Belanja Lembur			6.375.000	18.050.000	16.780.000				
			Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya			24.000.000	0					
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000	40.000.000	39.933.935				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			7.200.000	7.000.000	6.700.000				

		2	PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	1	DOKUMEN	34.145.400	23.070.000	22.691.196	98,36	100	APBOP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			452.000	452.000	445.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			266.000	266.000	252.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			3.758.400	0					
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			264.000	264.000	236.000				
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			5.700.000	0					
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			5.700.000	0					
			Belanja Lembur			3.005.000	2.088.000	2.088.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000	20.000.000	19.670.196				
		3	KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	1	DOKUMEN	19.938.600	19.938.600	17.247.675	86,50	100	APBOP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			112.800	112.800	53.500				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			345.000	345.000	330.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.729.800	1.729.800					
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			528.000	528.000	472.000				
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			6.030.000	6.030.000	6.030.000				
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			800.000	800.000	800.000				
			Honorarium Rohaniawan			1.600.000	1.600.000	1.200.000				
			Belanja Lembur			3.793.000	3.793.000	3.462.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5.000.000	5.000.000	4.900.175				

		4	KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	1	DOKUMEN	27.206.400	18.107.400	15.497.036	85,58	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			262.800	262.800	163.500				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			330.000	330.000	312.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.948.600	2.109.600					
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			405.000	405.000	354.000				
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			360.000	0					
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			8.900.000	0					
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000	15.000.000	14.667.536				
		5	FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	1	LEMBAGA	163.764.900	163.764.900	152.202.160	92,94	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			352.100	352.100	283.200				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			388.000	388.000	355.500				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			2.413.800	2.413.800	2.413.800				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1.056.000	1.056.000	920.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			11.805.000	11.805.000	11.700.000				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			27.600.000	27.600.000	27.600.000				
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			2.400.000	2.400.000	2.400.000				
			Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			12.000.000	12.000.000	12.000.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			25.000.000	25.000.000	24.529.660				
			Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			80.750.000	80.750.000	70.000.000				

		6	PERUMUSAN BAHAN KEBUJUKAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI ASN	1	DOKUMEN	265.303.064	277.437.264	258.516.789	93,18	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			257.000	257.000	245.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			335.000	335.000	318.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.788.800	0	0				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer			396.000	396.000	354.000				
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi			233.445.264	242.445.264	223.930.800				
			Belanja Lembur			9.081.000	9.004.000	9.004.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			20.000.000	25.000.000	24.664.989				
		7	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	1	DOKUMEN	32.999.800	32.403.200	31.563.000	97,41	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			341.200	341.200	317.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			266.000	266.000	252.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			365.600	0					
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer			396.000	396.000	354.000				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			231.000	0					
			Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			24.900.000	24.900.000	24.900.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6.500.000	6.500.000	5.740.000				
		8	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	1	DOKUMEN	39.255.200	41.647.920	40.014.305	96,08	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			8.314.000	8.252.800	6.958.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			202.000	271.000	235.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			969.200	91.600	0				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer			7.896.000	7.821.000	7.815.000				
			Belanja Lembur			6.874.000	4.870.000	4.870.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000	20.341.520	20.136.305				

2	MUTASI DAN PROMOSI AS	1.	PENGLOLAAN MUTASI ASN	1	DOKUMEN	94.149.400	87.122.800	86.089.615	98,81	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1.990.000	2.088.400	1.662.200				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			976.000	976.000	932.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.876.400	1.376.400	950.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			528.000	528.000	472.000				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.000.000	3.000.000	3.000.000				
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			360.000	360.000	360.000				
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			33.000.000	25.000.000	25.000.000				
			Honorarium Penyelenggara Ujian			25.600.000	23.400.000	23.400.000				
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			5.000.000	0					
			Belanja Paket/Pengiriman			500.000	0					
			Belanja Lembur			6.319.000	5.394.000	5.394.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000	25.000.000	24.919.415				
		2.	PENGLOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	1	DOKUMEN	83.207.350	91.728.000	85.488.205	93,20	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			334.800	371.500	156.500				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			266.000	532.000	252.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			3.458.550	903.500	900.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			396.000	792.000	354.000				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			900.000	0					
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			360.000	0					
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			2.250.000	2.250.000					
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			36.400.000	27.200.000	25.400.000				
			Belanja Lembur			8.842.000	14.679.000	13.854.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			30.000.000	45.000.000	44.571.705				

		3.	PENGLOLAAN PROMOSI ASN	1	DOKUMEN	55.754.500	40.460.500	22.194.970	54,86	100	APBDP Kota PKP	Karena adanya pergantian PPK (PJ Walikota) sehingga sampai dengan saat ini belum melakukan proses rotasi promosi mutasi pegawai
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			316.300	316.300	257.500				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			266.000	266.000	250.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			3.474.200	3.635.200					Harga Kop Emas dibawah SBU
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			405.000	405.000	360.000				
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			3.255.000	0					
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			22.600.000	10.800.000	400.000				
			Belanja Lembur			5.238.000	5.238.000	5.064.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000	15.000.000	14.663.470				
			Honorarium Rohan/awan			5.200.000	4.800.000	1.200.000				
3	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	1	PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	50	ORANG	20.345.400	26.073.704	23.699.167	90,89	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			330.600	330.600	257.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			266.000	266.000	250.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.302.800	1.302.800					Harga Kop Emas dibawah SBU
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			396.000	396.000	360.000				
			Belanja Paket/Pengiriman			500.000	0	0				
			Belanja Lembur			2.550.000	2.550.000	2.465.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000	21.228.304	20.367.167				

		2	PENGLOLAAN ADMINISTRASI DIKLAT DAN SERTIFIKASI ASN	1	DOKUMEN	32.310.100	32.150.100	28.147.790	87,55	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			876.100	876.100	765.200				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			334.000	334.000	282.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.210.000	400.000	375.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			540.000	540.000	460.000				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			6.450.000	0					
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			7.900.000	15.000.000	12.800.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000	15.000.000	13.465.590				
		3	PENGLOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	7	ORANG	94.756.400	99.606.400	84.193.071	84,53	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1.244.000	1.244.000	1.039.500				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			729.000	729.000	700.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.400.000	1.250.000	1.155.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1.383.000	1.383.000	1.204.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			400	400					
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			18.000.000	23.000.000	22.094.571				
			Belanja Beasiswa			12.000.000	12.000.000	12.000.000				
			Belanja Beasiswa S1			20.000.000	20.000.000	16.000.000				
			Belanja Beasiswa S2			40.000.000	40.000.000	30.000.000				

		4	EVALUASI DIKLAT DAN SERTIFIKASI JABATAN ASN	1	LAPORAN	36.848.600	36.661.600	26.701.940	72,83	100	APBDP Kota PKP	Narasumbernya pegawai internal OPD jadi tidak bisa dicairkan dan pelaksanaan telah selesai tanpa diperlukan jam kerja tambahan atau lembur
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			2.199.600	2.199.600	1.987.500				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			507.000	507.000	438.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.121.000	1.016.000	952.500				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			270.000	270.000	226.000				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			11.025.000	11.025.000	10.800.000				
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			11.200.000	3.000.000					
			Belanja Lembur			526.000	3.644.000					
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000	15.000.000	12.297.940				
		5	FASILITASI PENGEMBANGAN KARIR DALAM JABATAN FUNGSIONAL	50	ORANG	25.030.800	36.462.100	33.890.665	92,95	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			280.400	317.100	132.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			192.000	192.000	180.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.705.400	1.300.000					Harga Kop Emas dibawah SBU
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			528.000	528.000	472.000				
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			3.200.000	0					
			Belanja Lembur			4.125.000	4.125.000	3.366.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000	30.000.000	29.740.665				

4	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	1.	PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	1	DOKUMEN	21.015.800	21.149.800	20.625.115	97,52	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			199.800	199.800	193.400				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			266.000	266.000	252.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer			528.000	528.000	472.000				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.000.000	0					
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			5.700.000	0					
			Belanja Lembur			5.322.000	5.156.000	5.156.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa				15.000.000	14.551.715				
		2.	PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	70	ORANG	16.568.500	16.568.500	16.253.750	98,10	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			442.200	442.200	375.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			556.000	556.000	428.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			570.300	570.300	538.250				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000	15.000.000	14.912.500				
		3.	PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	1	LAPORAN	22.792.900	24.486.500	19.669.535	80,33	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			174.800	174.800	48.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			283.700	283.700	262.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.206.400	800.000					Harga Kop Emas dibawah SBU
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer			528.000	528.000	480.000				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.800.000	900.000					
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			3.800.000	1.800.000					
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000	20.000.000	18.879.535				

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	6	ORANG	30.000.000	17.400.000	17.400.000	100,00	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			30.000.000	17.400.000	17.400.000				

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	1	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70	ORANG	93.211.500	82.091.500	77.218.090	94,06	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			1.356.300	4.783.500	4.370.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			665.000	1.857.000	1.590.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.049.200	1.310.000	1.310.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer			641.000	641.000	547.000				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4.500.000	12.300.000	12.300.000				
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			5.000.000	22.800.000	22.400.000				
			Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			68.000.000	0					
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.000.000	38.400.000	34.701.090				

2	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	1	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	1	LAPORAN	1.030.444.200	1.036.684.200	943.402.298	91,00	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			3.083.200	1.847.704	1.051.500				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			490.000	490.000	477.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.400.000	400.000	375.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			610.000	610.000	561.000				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.760.000	0					
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			110.200.000	105.200.000	83.400.000				
			Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			710.782.000	650.782.000	612.969.000				
			Belanja Lembur			1.578.000	1.578.000					pelaksanaan telah selesai tanpa diperlukan jam kerja tambahan atau lembur
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			199.541.000	275.776.496	244.568.798				
Total sampai dengan bulan ini						9.514.218.242	6.618.400.910	6.100.450.246	92	100		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD

Analisis kinerja pelayanan BKPSDMD Kota Pangkal Pinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang kepegawaian merupakan lembaga teknis yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan manajemen kepegawaian di daerah khususnya di Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang dan berdasarkan Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pangkal Pinang mempunyai tugas pokok **“Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan”**, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
2. Penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkal Pinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkal Pinang bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
4. Penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
6. Pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
8. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2024, maka dapat diuraikan analisis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2023)	Capaian Kinerja																		SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD				
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																					
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	-	-	-	100	3.90	100	100	0.825	82.5	100	83	83	100	84	84	100	84	84		
2.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7.8	-	-	-	7.05	0.233	23.33	7.05	0.212	21.2	7.8	27	100	26	26	100	26	26	100		
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	-	-	-	100	0.36	36	100	0.45	45	100	39	39	47	49	100	47	49	100		
4.	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	79	-	-	-	77	1.22	100	78	78	100	79	79	100	-	-	-	-	-	-		
5.	Persentase ASN yang mengikuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	33.12	100	30	33.12	100		

	pendidikan dan pelatihan formal																				
6.	Persentase jumlah event yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8.1	100	7	8.1	100	
8.	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	100	100	92	100	100	
9.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	30.03	91	33	30.03	91	
10.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2.6	1.47	56.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	61.50	35.68	58.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	32	23	71.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	116	113	97.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

14.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.728	1.728	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	--	-------	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NO	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	83	84	85	82.5	83	83	84	
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			7.5	7.8	22	23	24	21.2	22	22	23	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	47	49	50	45	47	47	49	
4	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi			78	79	0	0	0	78	79	0	0	
5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			0	0	30	31	33	0	0	30	31	
6	Persentase jumlah event yang dilaksanakan			0	0	100	100	100	0	0	100	100	
7	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN			0	0	7	8	8	0	0	7	8	

8	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan			0	0	92	93	94	0	0	92	93	
9	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			0	0	33	33	37	0	0	33	33	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi BKPSDMD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu strategis di bidang kepegawaian, adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
2. Penempatan Pegawai Secara Lebih Optimal Sesuai Kompetensi Serta Analisa Beban Kerja Dan Analisa Jabatan
3. Peningkatan Disiplin Pegawai
4. Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian
5. Peningkatan Akurasi Data Pegawai
6. Peningkatan Kinerja SDM Aparatur
7. Sistem Kinerja Aparatur Sipil Negara (*Flexibel Working Arrangement*)

Selain isu-isu penting di atas, ada beberapa hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi OPD antara lain :

Permasalahan :

1. Aparatur Sipil Negara tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi).
2. Ketidaksesuaian pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja terhadap jabatan.
3. Belum dilakukannya pengembangan berbasis kompetensi dan pendidikan dan pelatihan formal kepada seluruh pegawai dikarenakan keterbatasan anggaran.
4. Promosi terbuka hanya terbatas pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
5. Capaian kinerja belum dijadikan dasar pembayaran tunjangan kinerja.
6. Absensi belum terintegrasi dengan sistem pembayaran tunjangan kinerja pegawai
7. Masih adanya kasus pelanggaran disiplin dan kode etik.
8. Arsip data pegawai dari PNS masih belum masuk semuanya ke BKPSDMD.

Penghambat :

1. Perumusan kebijakan dibidang kepegawaian belum optimal.
2. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi.
3. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal.

Pendorong :

1. Adanya kesempatan untuk pengembangan kompetensi pegawai.
2. Adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat.
3. Adanya kewenangan dalam manajemen dibidang kepegawaian.

Kekuatan :

Sedangkan kekuatan (*strenght*) yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang antara lain :

1. Komitmen pimpinan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Tersedianya sarana dan prasarana baik fisik maupun personil untuk penilaian kinerja ASN (Assessment center).
3. SDM Pengelola Kepegawaian yang berkompeten.
4. Pengembangan/dukungan sistem informasi yang terus dilakukan

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu Tiga (3) tahun. Tujuan yang ditetapkan atas dasar pernyataan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam jangka waktu satu sampai dengan Tiga tahun kedepan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 yaitu :

“Meningkatkan Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN)”

3.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 yaitu :

“Meningkatnya Penataan ASN sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensi”

Tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Jangka Menengah			Kondisi Akhir RPD
						2022	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN)		Indeks Profesional ASN	Nilai indeks profesional ASN kota hasil penilaian BKN	Nilai	48.13	49	50	51	51
2.		Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensi	Persentase ASN yang Ditempatkan sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensi	Jumlah jabatan struktural dan fungsional yang diisi oleh ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi dibagi jumlah jabatan struktural dan fungsional yang terisi	%	80	80	81	82	82

Tabel 3.2
Indikator Kinerja BKPSDMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Tahun			Kondisi Akhir RPD
		2022	2024	2025	2026	
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	82.5	83	84	85	85
Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	21.2	22	23	24	24
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	45	47	49	50	50
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	29	30	31	33	33
Persentase jumlah event yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100
Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	%	5	7	8	8	8
Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	%	91	92	93	94	94
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	25	33	33	37	37

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi misi. Program dan kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan. Pada tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang merencanakan 3 (Tiga) program dijabarkan dalam 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program

Pada Tahun 2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Prioritas, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang terdiri dari:
 - Program Kepegawaian Daerah
 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Program Pendukung, yaitu :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Rencana Kegiatan

1. Kegiatan Prioritas
 - 1) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan:
 - a. Perumusan bahan kebijakan Pengadaan ASN
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN.
 - c. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
 - d. Fasilitasi lembaga profesi ASN
 - e. Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN
 - f. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
 - g. Pengelolaan data kepegawaian
 - h. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 2) Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan mutasi ASN
 - b. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
 - c. Pengelolaan promosi ASN
 - 3) Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
 - b. Pengelolaan pendidikan lanjutanASN
 - c. Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN

- d. Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
 - b. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
 - c. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
- 5) Pengembangan Kompetensi teknis, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum.
- 6) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.
- 2. Kegiatan Pendukung
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- b. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan aset tetap lainnya
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

RKPD TAHUN 2026
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

RKPD 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2026	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95 Nilai	6.091.013.115	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95 Nilai	6.091.013.115
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78 Nilai			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78 Nilai	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyampaian dokumen perencanaan , penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	8.499.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyampaian dokumen perencanaan , penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	8.499.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.499.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.499.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.500.000

Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100%	4.983.330.979	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100%	4.983.330.979
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	4.980.330.979	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	4.980.330.979
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1 Laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1 Laporan	1.500.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	-98%	58.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	-98%	58.400.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	38.400.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	38.400.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 Orang	20.000.000
Kegiatan Administrasi umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	240.882.600	Kegiatan Administrasi umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	240.882.600
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.600.000	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.600.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	14.241.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	14.241.100
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.561.500	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.561.500
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.480.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.480.000

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	535.569.736	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	535.569.736
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29.210.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29.210.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	416.359.736	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	416.359.736
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	100%	182.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	100%	182.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	15.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	15.000.000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	107.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	107.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	60.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	60.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	82.330.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	82.330.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	35.330.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	35.330.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	47.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	47.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	1.816.007.526	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	1.816.007.526
	Rasio pegawai fungsional	30%			Rasio pegawai fungsional	30%	
	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	8%			Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	8%	
	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	94%			Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	94%	
	Persentase jumlah event yang dilaksanakan	100%			Persentase jumlah event yang dilaksanakan	100%	
	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi.	50%			Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi.	50%	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100%	411.383.525	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100%	411.383.525
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	82.134.026	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	82.134.026
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	27.100.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	27.100.000

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	28.250.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	28.250.000
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	17.190.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	17.190.000
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	205.500.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	205.500.000
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	13.000.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	13.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	21.209.500	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	21.209.500
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	17.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	17.000.000
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	100%	1.148.511.500	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	100%	1.148.511.500
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1.059.307.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1.059.307.000

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	40.094.500	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	40.094.500
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	49.110.000	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	49.110.000
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	188.322.500	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	188.322.500
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	25.547.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	25.547.000
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	8 Orang	111.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	8 Orang	111.000.000
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	22.000.000	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	22.000.000
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang	29.775.500	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang	29.775.500
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun	100%	67.790.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun	100%	67.790.000
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	23.650.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	23.650.000

Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	70 Orang	24.985.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	70 Orang	24.985.000
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	19.155.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	19.155.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	31%	610.975.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	31%	610.975.000
	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	37%			Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	37%	
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	106.400.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	106.400.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	80 Orang	106.400.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	80 Orang	106.400.000
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	504.575.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	504.575.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	504.575.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	504.575.000
			8.517.995.641				8.517.995.641

BAB V PENUTUP

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 nantinya akan menjadi bahan untuk penetapan Rencana Kerja Definitif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026. Dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang merencanakan 3 (Tiga) program dijabarkan dalam 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) sub kegiatan.

Sebagai penutup, apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima saran agar untuk tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai OPD pengelola kepegawaian Kota Pangkal Pinang.